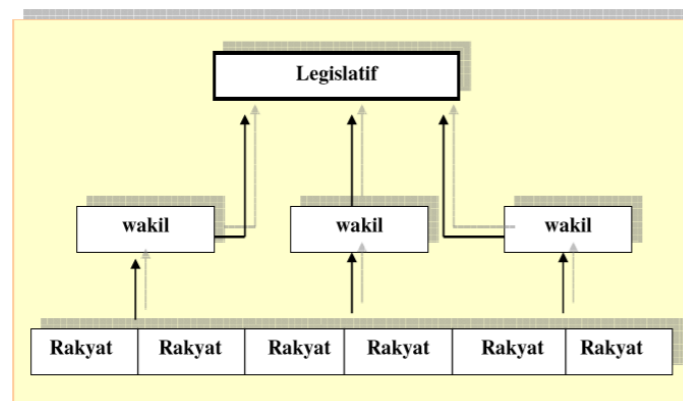


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi asas demokrasi yaitu musyawarah mufakat, dimana asas ini berlaku sistem keterbukaan dalam memecakan masalah-masalah yang kompleks di Indonesia baik dari sector ekonomi, politik sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. dalam beraktivitas kegiatan tersebut dirangkum dalam suatu lembaga legislatif yang bernama DPR (dewan perwakilan rakyat). Anggota DPR merupakan wakil-wakil rakyat dari seluruh provinsi (kabupaten dan kota) yang ada di Indonesia dengan tujuan menyuarakan permasalahan-permasalahan yang terdapat di setiap daerah di Indonesia. Pada tingkatnya lembaga ini terbagi menjadi dua tingkatan. Pertama disebut dengan dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DRP-RI) dan yang kedua disebut dengan Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).



Gambar 1: Perwakilan Rakyat
Sumber : Joeniharto SH, 1982

Gedung DPRD merupakan wadah aktifitas lembaga pemerintah dari anggota dewan legislatif dalam bentuk bangunan. Aktifitas kegiatan tersebut berhubungan dengan dua unsur yaitu kelembagaan esksekutif dengan masyarakat dimana kedua nya mempengaruhi tugas dan wewenang dari anggota dewan legislatif. Hubungan DPRD dengan lembaga pemerintah merupakan hubungan kerja yang berkaitan dengan wewenang DPRD sebagai pengontrol pemerintah.

Sedangkan hubungan dengan masyarakat merupakan hubungan tugas dari DPRD sebagai penampung aspirasi rakyat yang akan disampaikan kepada pemerintah, sehingga tugas dan wewenang itulah yang merupakan pembentuk dari fungsi dari bangunan itu sendiri

Gedung DPRD sabagai wadah kegiatan lembaga ini nanti nya akan digunakan para wakil-wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasiya. Sehingga diharapkan bangunan DPRD sabagai rumah rakyat juga mencerminkan yang merakyat. Merakyat dalam artian bahwa bangunan tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan antara rakyat dan para wakilnya yang duduk dilembaga dengan kesan lembaga. Dengan kesan beribawa dan terbuka maka kesan secara visual seolah olah rakyat terasa terlindungi, terwakili, dan tersalurkan aspirasinya serta tetap menghormati kedudukan dan keberadaan anggota dewan.

Pemilihan anggota dilakukan setiap lima tahun bersamaan dengan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat provinsi. Pada periode 2019-2024, dewan perwakilan daerah provinsi Sumatra Barat memiliki anggota 65 orang yang berasal dari perwakilan 10 partai politik, yang memiliki tugas dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan seperti membentuk peraturan daerah provinsi serta membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi bersama dengan gubernur. Dalam menjalankan tugas yang amanatkan, tentunya banyak hal yang dibutuhkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satunya adalah tempat kegiatan. Kantor merupakan prasarana penting bagi sebuah instansi, karena selain untuk tempat kegiatan, kantor juga menjadi bukti fisik eksistensi sebuah instansi. Untuk itu, pada tahun 2019 lalu direncanakanlah pembangunan gedung kantor dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatra Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur dari pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan dari seluruh rakyat daerah yang bersama kepala daerah lembaga ini menjalankan tugas dan wewenang pemerintah daerah dibidang legislatif dan beranggotakan wakil-wakil dari organisasi peserta Pemilu. Lembaga ini terbentuk dari kedaulatan rakyat daerah melalui pemilihan umum untuk menjadikan wakil mereka dalam menyalurkan.

1.2 Data dan Fakta

1.2.1 Data

PADANG – Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, sudah ditetapkan Anggaran pembangunan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Padang tahun 2020. Pembangunan akan dikerjakan dengan sistem tahun bertahap dengan, pembangunan gedung baru ini sebelumnya sudah direncanakan beberapa tahun lalu. Lokasi pembangunan berada di kawasan Aia Pacah, tidak jauh dari kantor Balai kota.



Gambar 2: Lokasi Site

Sumber : Google Earth Diakses 24 November 2019

“Kesepakatan KUA PPAS APBD sudah ditandatangani sekaligus kesepakatan pembangunan gedung berlokasi di Kawasan Aia Pacah dengan penganggaran secara bertahap (multiyear) dimulai pada tahun 2020 nanti, terang Elly. Sebelum nya rencana pembangunan gedung baru tersebut batal di anggarkan dalam APBD 2017. Meskipun, pada saat pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2017 sempat dilakukan pembahasan.

1.2.2 Fakta

Hal itu dikatakan Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Faisal Nasir yang menilai pembangunan gedung baru DPRD Kota Padang memang sudah sangat patut dilakukan. Apalagi lahannya sudah tersedia di kawasan Aia Pacah sebagai pusat kawasan untuk perkantoran pemerintahan di Kota Padang.

Dikatakan Faisal, gedung DPRD Padang saat ini sangat tidak representatif lagi. Bukan karena kemegahannya, tapi terkait luas gedungnya. Saat ada acara besar, maka lahan yang ada saat ini tidak bisa mengakomodir para tamu.

Pembangunan gedung baru DPRD Kota Padang sudah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat kondisi Gedung yang sekarang ini sudah tidak representatif. Kondisi bangunan termasuk Ketersediaan halaman parkir kendaraan sudah tidak mencukupi kebutuhan. Sementara anggota Komisi III DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan mengatakan, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk tidak membangun gedung baru DPRD Padang, sebab lahan untuk pembangunan sudah tersedia. “Tidak ada lagi alasan penundaan pembangunan” pungkasnya. (baim).

1. Dari seluruh kantor DPRD yang ada di Sumatra barat kantor DPRD ini lah yang tidak memadai dalam segi bentuk arsitekturnya, ruang ruang, lahan dan masa bangunan
2. Letak lokasi kantor DPRD kota padang tidak strategis lagi, dan presentatif
3. Bentuk bangunan dan fungsi bangunan tidak memadai lagi.

1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Rumusan Masalah Arsitektural

Bagaimana cara memberikan wadah bagi aktivitas anggota dewan berupa gedung DPRD di sumbar, di kota Padang yang fungsional sesuai dengan aktivitasnya.

1. Bagaimana menjadikan bangunan kantor DPRD yang monumental yang berkonsep modern.
2. Bagaimana cara menjadikan bentuk kan arsitektur yang mencerminkan kantor DPRD yang wakil rakyat.
3. Bagaimana menghadirkan parkir yang cukup bagi karyawan kantor DPRD.
4. Bagaimana menghadirkan bentuk dan kebutuhan anggota untuk masa yang akan datang.

1.3.2 Rumusan Masalah Non Arsitektural

Sebagai wadah yang memiliki kesan terbuka lingkungan sekitar dalam hal ini masyarakat, dan mampu memperlihatkan kewibawaannya sebagai dewan Legislatif sebagai penyalur aspirasi rakyat, dengan menunjukkan identitas wilayah kota padang yang dinamis dan berwawasan global dengan menampilkan bangunan dengan arsitektur modern.

1.4 Ide/Kebaruan

Menjadikan kantor DPRD kota padang sebagai pembentuk elemen utama, pembentuk kota memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan kondisi sosial masyarakat kita. Memakai pendekatan arsitektur bioklimatik dapat membantu mewujudkan dan bahkan mendorong cara hidup yang berkelanjutan, yang menonjolkan bentukan monumental pada pengguna itu sendiri.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5.1 Ruang Lingkup Spatial

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Koto tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, pada Pasal 1 “Dengan Peraturan Pemerintah ini, pusat pemerintahan Kota Padang dipindahkan dari wilayah Kecamatan Padang Barat ke wilayah Kecamatan Koto tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.”

Jadi, terkait pemindahan fasilitas Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang ke wilayah Kawasan Terminal Air Pacah, menimbulkan banyak permasalahan tidak hanya dalam segi proses pelaksanaan pembangunan fasilitas tersebut, tetapi juga berdampak kepada para pihak yang terkait yaitu PT. FML dan para pemilik ruko, sehingga dengan berdirinya Pusat Pemerintahan Kota Padang di atas lahan Terminal Air Pacah.

1.5.2 Ruang Lingkup Substansial

Agar penelitian terarah, berjalan dengan baik dan memiliki batasan kegiatan adapun ruang lingkup kegiatan penelitian yang akan dibahas yaitu:

1. Melakukan survey ke lokasi sesuai ruang lingkup perencanaan bangunan.
2. Rumusan masalah yang telah ditetapkan.
3. Menganalisis masalah yang ada pada bangunan / kawasan yang akan di bangun.
4. Menganalisis data yang di peroleh.
5. Perumusan konsep desain untuk perencanaan.

BAB I PENDAHULUAN

Penjabaran latar belakang kota padang dan rumusan masalah, tujuan dan sasaran manfaat yang bias di kembangkan di kota padang atau lebih tepatnya di air pacah koto tangah kota padang. Ruang lingkup pembahasan sistematik.

BAB II TINJAUAN TEORI

Melakukan tinjauan berdasarkan literatur/teori yang akan digunakan mengenai pendekatan ekologi arsitektur terhadap objek yang akan dirancang.

BAB III TINJAUAN DATA DAN LOKASI

Melakukan tinjauan mengenai data – data yang dibutuhkan terkait lokasi objek yang akan dirancang.

BAB IV GAGASAN PENGEMBANGAN

Mengemukakan tinjauan perencanaan pengembangan kawasan, terkait dengan prinsip perancangan arsitektur.

BAB V ANALISIS PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN & PERANCANGAN

Proses penentuan konsep kawasan wisata pantai yang akan dirancang melalui analisis terhadap site untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai peruangan, orientasi bangunan, pencapaian, tampilan bangunan, tata massa, utilitas dan struktur.